



JAKARTA, KOMPAS.com (Glori K. Wadrianto) — Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik per 1 Juli 2010 karena alasan pemerintah dinilai tidak tepat.

"Kami menolak usulan pemerintah yang akan menaikkan harga TDL per 1 Juli nanti," kata anggota Komisi VII dari F-PKS, Sigit Sosiantomo, sesuai rapat pleno F-PKS di Gedung DPR Jakarta, Selasa (15/6/2010).

Mereka mengemukakan, pemerintah tidak boleh mengorbankan masyarakat karena produksi listrik yang terus naik sehingga masyarakat harus membayar harga listrik yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Sigit mengungkapkan, naiknya harga produksi listrik setiap tahun disebabkan oleh bauran energi di pembangkit listrik yang tidak efisien. PLN masih menggunakan BBM sebagai bahan pembangkit listrik terbesar (30 persen). Padahal, dalam rencana pemerintah tahun 2010, mereka hanya menggunakan 19 persen BBM untuk pembangkit listrik.

"Oleh karena itu, PKS tidak setuju dengan kenaikan TDL. Beban subsidi listrik harus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera mengupayakan terpenuhinya bauran energi untuk pembangkit energi yang lebih berimbang," kata Sigit.

Sebagai solusi, PKS mengusulkan kepada pemerintah agar pembangkit listrik menggunakan

energi selain BBM, yakni gas, panas bumi, atau batu bara dengan persentase lebih besar sehingga biaya produksi pembangkit akan lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan BBM.